

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA  
SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI  
(Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan  
Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH:

TRIA KUSUMAWARDANI

NPM: 142103025

**JURUSAN Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2018 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL DALAM  
KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI  
(Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan  
Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH:**

**Tria Kusumawardani**  
**NPM: 1421030258**

**PEMBIMBING I : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H, M.H**  
**PEMBIMBING II : Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2018 M/1440 H**

## ABSTRAK

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau menurut konsep mudharabah.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada peternak sapi di Dusun Sumber Agung. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL  
DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN  
TERNAK SAPI (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun  
Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten  
Tanggamus)**

Nama : **TRIA KUSUMAWARDANI**  
NPM : **1421030258**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Mu'amalah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. M. Wagianto, S.H.,M.H**  
**NIP.196201111994031001**

**Pembimbing II**

**Relit Nur Edy, S.Ag.,M.Kom.I**  
**NIP.196901051998031003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI** (Studi Kasus Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus) disusun oleh **TRIA KUSUMAWARDANI, NPM. 1421030258, Jurusan Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 17 September 2018**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

(.....)

**Sekretaris : Arif Fikri, S.HI., M.Ag.**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Jamasyah, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 19700901199703100**

## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

*Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS-Al-Taubah (09):105)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:2007,hlm, 663

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tuaku, Alm. Ayah Muh. Muslih, Ayah Muslim Alisyah, Ibu Siti Mafruah yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh di mata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini.
2. Kakak-kakak dan adikku, Odo fery, Mba Ita, Mba Linda, Mba Lia, Mas Syukron, Mas Chandara, Dek Margi Utomo, Ina, dan Ika yang selalu memberi motivasi, semangat, perhatian, dan keceriaan sehingga studiku dapat terselesaikan.
3. Keponakan saya Reza, Citra, Wira, Fajar, Angga, Qisya, Ataki, Ataka, dan Shanum yang memberi semangat pada diri penulis.
4. Teman-Teman seperjuangan, Rizki Safitri, Ferinda Tiara Nisa, Reki Saputra, Ardi Stiawan, Erhana Mira Susan, Ririn Nadia Putri, Ria Nur Habibah, Zalfia Khafianti, Indah Wati, Siti Rohmawati, Dinda, dan Umi Nur Rahmah yang tak bosan-bosannya memberi semangat kepada penulis.
5. Kakak Nasrul Anwar yang selalu memberikan doa dan semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.



## **RIWAYAT HIDUP**

**Tria Kusumawardani**, lahir di Bandung Baru, pada tanggal 30 Agustus 1995, Anak ketiga dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Muslih dan Ibu Marfuah.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 4 Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Islamiyah Sukoharjo tamat pada tahun 2011, pendidikan selanjutnya dijalani di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta tamat pada tahun 2014. Dan ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM Taekwondo angkatan 2015 dan menjadi juara 2 di pertandingan antar club dan menjadi wakil ketua HMI jurusan muamalah masa bakti 2015-2016. Penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus seperti PMII dan KPI.

Bandarlampung, 30 Agustus, 2018  
Penulis,

**Tria Kusumawardani**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karuniaNya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, Mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad lah yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. H. A. Khumaidi Jafar, S.Ag.,M.H dan Bapak selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H dan Ibu Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepada Bapak Heri Subarjo selaku kepala pekon Margodadi Dusun Sumber Agung yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karna itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandarlampung, 30 Agustus 2018  
Penulis,

**Tria Kusumawardani**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
 <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	 <b>21</b>
<b>A. Konsep Mudharabah.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Mudharabah .....	21
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	28
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah .....	33
4. Prinsip-prinsip Mudharabah.....	43
5. Macam-macam Mudharabah.....	46
6. Berahirnya Mudharabah.....	53
7. Hikmah Mudharabah.....	57
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak....</b>	<b>59</b>
1. Dasar Hukum.....	59
2. Hak-Hak Dan Kewajiban Pemilik Sapi Dan Pemelihara .....	60



3. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko Dalam Perjanjian Bagi Hasil Herwan Ternak .....	62
<b>BAB III PROFIL DESA .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa .....</b>	<b>65</b>
1. Sejarah Desa.....	65
2. Jumlah Penduduk .....	68
3. Kondisi Geografis Desa .....	69
4. Kondisi Perekonomian .....	69
5. Kondisi Sosial Budaya .....	71
6. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	72
<b>B. Praktik Kerja sama Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Hewan Ternak Sapi Pada Masyarakat Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Hewan Ternak Sapi Pada Masyarakat Studi Kasus pada di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Hewan Ternak Sapi .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus )” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>3</sup>
3. Bagi Hasil (*al-mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>4</sup>
4. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.<sup>5</sup>
5. Pengembangbiakan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h.1060

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) h.154

<sup>4</sup> Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.95

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan/Online, KBBI Pusat Bahasa

6. Ternak Sapi adalah hewan yang dipelihara untuk dibiakkan.<sup>7</sup>
7. Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung merupakan salah satu Pekon yang terletak di kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dalam kegiatan pengembang biakan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya usaha perkongsian yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yaitu kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, pemilik modal dan penerima modal.
2. Karena keinginan untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi pada Masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus
3. Untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang pembagian hasil dalam kerjasama pengembang biakan ternak.
4. Adanya kesejangan antara aturan yang telah ditetapkan Islam dengan praktik pembagian hasil dalam kerja sama yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*



### C. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan

Agama Islam mempunyai Dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masala-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan

lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*

Secara teknik, bagi hasil (*Mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pePekonan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan apa-apa secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h, 4

itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>9</sup>

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>10</sup>

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.135

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h.83



حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا بَشَرُ ابْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَا لِلْبَيْعِ

*Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).<sup>11</sup>*

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari’ah dan segi lainnya.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah. h. 305

<sup>12</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007) h.231

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.<sup>13</sup>

Praktik pada Masyarakat Pekon Magodadi Dusun Sumber Angung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, melakukan pengembangbiakan ternak khususnya pada hewan sapi atau bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak sapi sangatlah menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya terdapat 3 cara yang dipakai oleh Masyarakat sekitar yaitu :

---

<sup>13</sup> Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h.302

1. Kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor sapi betina dan sapi jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian bila sapi tersebut beranak yang pertama, maka anak sapi tersebut seluruhnya milik orang yang memeliharanya dengan kata lain pemilik sapi tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut. Setelah sapi tersebut dibagi dua antara pemilik sapi dan orang memelihara sapi. Dan begitu seterusnya.
2. Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila Sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka seluruh sapi tersebut dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan sapi tersebut barulah dibagi dengan pemelihara 40% dan pemilik 60%.
3. Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka antara pemilik sapi dan pemelihara sapi hanya secara bergantian mendapatkan hasil. Misal sapi melahirkan anak pertama kali untuk pemilik sapi, dan jika sapi itu melahirkan kembali maka untuk pengelola dan begitu seterusnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:



1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan Sapi pada Masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka

1. Tujuan dari penelitian ini
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

- b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi Sesuai Syari'at islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.<sup>14</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

---

<sup>14</sup> Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) h.2

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.<sup>15</sup>

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu data hasil wawancara di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>15</sup> Furchan, A. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2004) hal.447

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Objek atau Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, adapun Sudjana yang dikutip Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran.<sup>16</sup>

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>17</sup>

Menurut Nazir mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan dengan data bukan barang atau bendanya. Pengertian lainnya, diungkapkan oleh Nawawi yang menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan,

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Renika Cipta1991), h, 102.

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2003).h.15



tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>18</sup>

Sedangkan Ridwan mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran menjadi objek penelitian. Menurut Margono populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil tentang pengembangbiakan sapi di di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. Adapun yang melakukan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus ditemukan ada 6 orang. Dengan jumlah pemilik sapi 3 orang dan pengelola 4 orang Adapun populasi berjumlah 6 orang pemilik sapi dan 7 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif sedikit.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil poplasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel yang diunakan adalah *purposive* sampel yang telah ditentukan berdasarkan bebeapa pertimbangan tertentu. Menurut Muri secara

---

<sup>18</sup> Nazir. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.2005).h.31

<sup>19</sup> Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta: Rineka Cipta. 2004).h.118

sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Suharsimi, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>21</sup> Beberapa pendapat ahli tentang pengertian sampel adalah sebagai berikut:

- a. Sax mengemukakan bahwa sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur-unsur yang terpilih dari suatu populasi, unsur-unsur tersebut hendaklah mewakili populasi.
- b. Warwick mengemukakan pula bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas, yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan.
- c. Kerlinger menyatakan: Sampling is taking any portion of a population or universe as representative of that population or universe.
- d. Leedy mengemukakan bahwa sampel dipilih dengan hati-hati sehingga dengan melalui cara sedemikian peneliti akan dapat melihat karakteristik total populasi.<sup>22</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana,

---

<sup>20</sup> Dedy. 2012. Makalah Populasi dan Sampel. [http://www//.populasi dan sampel\makalah-populasi-dan-sampel2.html](http://www//.populasi%20dan%20sampel/makalah-populasi-dan-sampel2.html). Akses tanggal 10 Agustus 2018

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Dedy., *Op.Cit.*

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif (mewakili).

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu pemilik dan pemelihara sapi yang melakukan akad kerja sama bagi hasil dalam mengembangkan ternak sapi berdasarkan pengalaman yang cukup lama dalam melakukan kerja sama ini, serta pemilik dan pemelihara sapi yang menerapkan salah satu dari tiga model akad yang ditemukan di lapangan, model akad tersebut yaitu:

Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan diatas maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 4 orang yaitu 2 orang pemilik hewan dan dua orang pengelola di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.<sup>23</sup> Yang aman sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan

---

<sup>23</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 85

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke lokasi, di sana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerjasama bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan sapi di di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan di mana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>24</sup> Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Berdasarkan tersedianya *interview guide* dan jumlah interviewee dikenal:

1) Interview Terpimpin

Dikenal pula sebagai *guided interview/ controlled interview/ structured interview* dimana interviewer:

- a) Mempergunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya
- b) Mengumpulkan data melalui Tanya jawab

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007) h. 83



c) Mempunyai data yang relevan dengan maksud penyelidikan yang telah dipersiapkan dengan matang.

2) Interview tak terpimpin

Dikenal pula sebagai unguided interview/non detective interview dimana proses interview tidak dikendalikan oleh satu pedoman yang telah disiapkan oleh interviewer sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas (free talk).

3) Interview bebas terpimpin

Merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tak terpimpin.

4) Interview pribadi dan interview kelompok

Jenis interview ini didasarkan atas banyaknya interviewee. Interview pribadi berwawancara dengan satu orang interviewee. Interview kelompok berwawancara dengan lebih dari satu interviewee. Interview kelompok tidak berfungsi bila ada seorang dari interviewee mengangkat dirinya sebagai pembicara.<sup>25</sup>

Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus yang melakukan perjanjian bagi hasil pengembangbiakan sapi dan aparaturnya.

c. Dokumentasi

---

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 94

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup>

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan *dokumen skunder*, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen skunder.<sup>27</sup>

Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh sebab itu penggunaannya sangat selektif.<sup>28</sup>

Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h. 188

<sup>27</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70-71

<sup>28</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 101-102

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>29</sup>

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengembangbiakan sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo

---

<sup>29</sup> Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Cet.3. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).h.23

<sup>30</sup> Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002) h. 15

Kabupaten Tanggamus. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Madharabah* arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.<sup>31</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 yaitu<sup>32</sup>

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzammil:20)<sup>33</sup>

Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 244

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: AL Ma'arif, 1997) h. 36

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h. 575

untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.<sup>34</sup>

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>35</sup>

Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).<sup>36</sup>

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.<sup>37</sup> Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

*Mudharabah* adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

---

<sup>34</sup> Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah) h.53

<sup>35</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 11

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 36

<sup>37</sup> Rachmat Safe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 427

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.<sup>38</sup>

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu<sup>39</sup>:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.<sup>40</sup>

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua

---

<sup>38</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h.90

<sup>39</sup> Helmi Karim, *Op.Cit.*, h. 12

<sup>40</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) h. 6

pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>41</sup>

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad *mudharabah*, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.”<sup>42</sup>

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.<sup>43</sup>

Menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>41</sup> Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) h. 63

<sup>42</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 96

<sup>43</sup> Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga) h. 35



- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى اشْرَكَةٍ فِي الرَّبْعِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.<sup>44</sup>

- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِعَیْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصٍ لِنَقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.<sup>45</sup>

- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَحَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجَرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra) h. 35

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 38

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 42

- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

عُقْدُ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لَا لِيَتَجَرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartaya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”<sup>47</sup>

- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharaah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>48</sup>

- g. Menurut Imam Taqiyyudin, *Mudharabah* ialah

عُقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”<sup>49</sup>

*Mudharabah* atau *qiradh* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal.<sup>50</sup>

*Mudharabah* atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 37

<sup>49</sup> Taqiyyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, (Bandung: Alma'arif) h. 301

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) h.

modal namun tidak bisa berbisnis, dan ihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.<sup>51</sup>

Praktik mudharabah pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan khadijah. Praktik mudharabah menggambarkan hubungan kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. *Mudharib* adalah orang yang memiliki keahlian, sementara *shahibul mal* orang yang memiliki dana, yang nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan bersama<sup>52</sup>

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini megembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.<sup>53</sup>

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitugkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui

---

<sup>51</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008) h. 168

<sup>52</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 190

<sup>53</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakata:Gema Insani, 2006) h. 468

bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>54</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.

---

<sup>54</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010) h. 223

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".<sup>55</sup>

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>56</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".<sup>57</sup>

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ... ٢٨٣

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)) h. 106

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 48



*Artinya: ...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*<sup>58</sup>

Al-Qur'an surat Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

*Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.*<sup>59</sup>

Al-Qur'an surat Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*<sup>60</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ١٩٨

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.*<sup>61</sup>

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

---

<sup>58</sup> Ibid, h. 49

<sup>59</sup> Ibid, h. 575

<sup>60</sup> Ibid, h. 554

<sup>61</sup> Ibid, h. 31

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>62</sup>

b. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا بَشَرُ ابْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>63</sup> Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah. h.

c. Ijma'

*Mudharabah* disyari'atkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.<sup>64</sup> Di antara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>65</sup> Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

d. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>66</sup> Dengan adanya kerja sama

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Op.Cit*, h. 155

<sup>65</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 226

<sup>66</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) h. 191

antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>67</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* , yaitu sebagai berikut:

#### a. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>68</sup>

Rukun *mudharabah* menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan

---

<sup>67</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 370

<sup>68</sup> M. Abdul Mujieq, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 300

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.38

adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan.<sup>70</sup>

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiz. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat (ijab dan qobul)

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad

---

<sup>70</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Op.Cit*, h. 199



- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.<sup>71</sup>

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (Shahibul Mal)
- 2) Pengelola (Mudharib)
- 3) Ucapan serah terima (*Sighat ijab wa qabul*)
- 4) Modal (ra'sul mal)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan.<sup>72</sup>

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*:

- 1) Pemilik modal (robbul mal) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (mudharib) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan

---

<sup>71</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.177

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.92

pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

- 2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalamangka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.<sup>73</sup>

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.

1. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

2. Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

---

<sup>73</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit*, h. 246

a. Modal

Modal disyaratka harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecualibila disepakati unuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

b. Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah , daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau yang sejenisnya.

c. Keuntungan

Keuntungan dalam system penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempatdan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu aalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha

itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui system penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam system pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya.

Sehingga bukan hana dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.<sup>74</sup>

### 3. Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-ha yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.

#### b. Syarat bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari

---

<sup>74</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Shalah As-Shawi, Op. Cit*, h. 170-178



pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.<sup>75</sup>

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *mudharabah*nya fasid

---

<sup>75</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ahAbdullah, *Op.Cit*, h. 199

- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah *mudharabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- 9) Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- a. Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa

dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>76</sup>

b. Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan Qabul).<sup>77</sup>

c. Berkenaan dengan laba, bahwa:

- 1) Laba harus memiliki ukuran.

*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

---

<sup>76</sup> Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 223

<sup>77</sup> Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, h. 228

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.<sup>78</sup>

#### 4. Prinsip *Mudharabah*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut

---

<sup>78</sup> *Ibid*

semakin jelas terlihat bahwa system ekonomi islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.<sup>79</sup>

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>80</sup>

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam

---

<sup>79</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004) h. 84

<sup>80</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990) h. 10



keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.<sup>81</sup>

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan

---

<sup>81</sup> Helmi Karim, *Op.Cit*, h. 14

taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.<sup>82</sup>

d. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

## 5. Macam-Macam *Mudharabah*

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh

---

<sup>82</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, h.48

<sup>83</sup> Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafe'I Antonio, *Op.Cit*, h. 22

pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.<sup>84</sup>

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk<sup>85</sup>, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu)<sup>86</sup>. Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *mudharabah* yaitu

---

<sup>84</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt) h.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>86</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005) h.59

sebagai berikut: *Mudharabah* Mutlak ( *Al-muthlaq*), dan *mudharabah* terikat (*Al-muqayyadah*).

a. *Mudharabah* mutlak (*al-mutlak*)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini *mudharabah* mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.*”<sup>87</sup>

*Mudharabah* mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan if'al ma Syi'ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.*”<sup>88</sup>

Menurut Syafi'I Antonio *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah

---

<sup>87</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 310

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 372

bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.<sup>89</sup>

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam<sup>90</sup>, pada *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

*Mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata

---

<sup>89</sup> Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 90

<sup>90</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 1197



mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.<sup>91</sup>

*Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

*Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian

---

<sup>91</sup> M. Umer Capra, *Towards A Just Monetary System (terjemahan)*, (London: The Islamic Foudation, 1985) h. 248-249, tersedia dalam [www.Google.book.com](http://www.Google.book.com)

dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>92</sup>

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.<sup>93</sup>

*Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Batasannya antara lain tentang :

a. Tempat dan cara berinvestasi,

---

<sup>92</sup> Heri Sudarsono, *Op.Cit*, h. 60

<sup>93</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 1197

- b. Jenis investasi,
- c. Objek investasi,
- d. Jangka waktu.

*Mudharabah muqayyadah* terdapat dua bagian, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya.

*Mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan jelas, baik batasan tentang proyek yang diperoleh, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharibnya* telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua belah pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila diaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, 'usahakan modal ini mulai bulan depan' sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.<sup>94</sup>

## **6. Berakhirnya *Mudharabah***

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan

---

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 372

fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>95</sup>

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul mal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.<sup>96</sup>

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal.

Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik

---

<sup>95</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 148

<sup>96</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 143



modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.<sup>97</sup>

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe'I, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, laangan mengusahaka, da pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta odal telah diserahkan ketika pembatala dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah seorang akid meninggal dunia.

Jumhur ulama' berpendaat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupu pengusaha. Hal ini

---

<sup>97</sup> Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, h. 237

karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan datang dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah seorang akid gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,

## 7. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasi demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karena syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>99</sup>

Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur'an Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

*Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005) h.

<sup>100</sup> Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), h.106

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat.

*Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki syar'i yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا بَشَرُ ابْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (H.R Ibnu Majah).<sup>101</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).

---

<sup>101</sup> Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Darun Nasyr Al Misryiyah).  
h. 305

- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.<sup>102</sup>

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan system bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa olong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

## **B. Bagi Hasil Hewan Ternak Menurut Hukum Islam**

### **1. Dasar Hukum**

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin da ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahaka hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil hewan ternak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulalloh SAW:

---

<sup>102</sup> *Ibid.*,



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: *Hadits dari Abdullah bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan ataupun hasil perkebunannya. (H.R Bukhari Muslim).*<sup>103</sup>

Sehubungan dengan tidak adanya hadits yang menjelaskan tentang bagi hasil ternak sapi secara terperinci. Maka, hewan ternak sapi dapat di 'illatkan dengan buah-buahan sehingga hadits di atas dapat menjadi landasan hukum mengenai diperbolehkannya bagi hasil hewan ternak sapi.

## **2. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pekerja**

### **a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal**

Pada kerja sama bagi hasil hewan ternak pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban yaitu:

- 1) Pemilik modal berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
- 2) Pemilik modal mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
- 3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.

---

<sup>103</sup> Abu Yahya Zakaria, Riyadus Salihin, Terjemah Al-Hafidz dan Masraf Suhaini, (Surabaya: CV. Mahkota, 1994) h. 74

- 4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama diperlukan mengenai kegiatan usaha bagi hasil.
- 5) Pemilik modal berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerja sama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
- 6) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya pengobatan sepenuhnya jika hewan ternak sakit.
- 7) Jika hewan ternak mati, pemilik modal wajib bersedia menanggung resiko. Tidak ada ganti rugi pekerja kepada pemilik dan tidak ada ganti rugi pula dari pihak pemilik modal kepada pekerja.<sup>104</sup>

b. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja memiliki beberapa hak dalam akad kerja sama bagi hasil hewan ternak, yakni nafkah (*living cost* atau biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad.

Ulama berbeda pendapat tentang hak pekerja atas aset *mudharabah*. Menurut Imam Syafe'i *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di Rumah atau dalam perjalanan. Karena *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama

---

<sup>104</sup> Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>

nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih

### 3. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko Dalam Perjanjian Bagi Hasil Herwan Ternak

Prinsip bagi hasil merupakan system mitra atau kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat factor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha ternak sapi tersebut, bila factor pendukung atau pendorong usaha ternak sapi maupun factor penghambat.

Menurut istilah fiqih apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul mal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>105</sup>

Abdurahman al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi

---

<sup>105</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Gema Insan, Jakarta, 2000). h. 58

kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar yang disebut *ujratul-mitsil*.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk mendapat untung atau singkatnya akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Besar kecilnya pembagian laba menurut pemilik sapi dengan yang lainnya tidaklah sama, tergantung pada pribadi masing-masing pembagian ini dihitung setelah sapi dijual yaitu:

1. Kalau sapi jantan dewasa, cara bagi hasilnya sapi dijual dahulu dan labanya dibagi dua. Misalnya pemelihara sapi sudah berjalan selama 2 tahun dijual atas kesepakatan kedua belah pihak harga pokok satu juta rupiah dan setelah dijual sisa labanya berjumlah 2 juta. Pembagian keuntungan 50% pemilik sapi dan 50% penggaduh.
2. Kalau sapi betina tidak punya anak penggaduh mendapat bagi hasil sama dengan sapi jantan dewasa yaitu sapi dijual oleh pemilik sapi dan labanya dibagi menjadi dua.
3. Andai sapi betina beranak, maka bagi hasilnya yang 30% pemilik sapi yang 70% pengelola sapi. Pembagian ini berupa uang ketika sapinya dijual.

Karena pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi shahibul maal, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelola dengan seizing *shaahibul maal*.<sup>106</sup>

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>107</sup>

Pada umumnya sistem bagi hasil dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan.

Melihat perhitungan keuntungan dari bermacam-macam jenis sapi di atas dan kenyataan yang terjadi di desa Sumber Agung dapat dikatakan bahwa pengelola apabila dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka pengelola harus bisa memelihara dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>106</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007) ed, 1, h. 68

<sup>107</sup> Abdul Rohman Ghazali, Ghufon Insan dan Saipuldin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana 2010), Cet Ke-1, h, 132s



## **BAB III**

### **PROFIL DESA**

#### **A. Gambaran Umum Desa**

##### **1. Sejarah Desa**

Dusun Sumber Agung dibuka dan diresmikan pada hari Kamis Kliwon 9 September 1953. Desa Sumber Agung dibuka oleh BRN atau tentara nasional ketika itu sebanyak 120 orang. Masuk ke dalam kecamatan Sumberejo Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa tahun kemudian mekar dan masuk ke kabupaten Tanggamus Kecamatan Sumberejo.

Dusun Sumber Agung terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawija dan kopi. Konon tanah di Dusun Sumber Agung sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Dusunnya pun bisa dikatakan sangat makmur.

Karena kekaguman atas besarnya persatuan dan harapan masyarakat ini mereka bersepakat untuk menamakan Dusun Sumber Agung. Mereka berharap desa ini nantinya bisa menjadi desa yang makmur, dan masyarakat yang berbudi pekerti yang tinggi.

Dalam pelaksanaan pemerintah desa, Kepala Desa Sumber Agung dibantu oleh perangkat yang lain yaitu Kepala Dusun (kadus), maupun RW dan RT. Selain itu desa Sumber Agung memiliki suatu lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kerja desa yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diangkat oleh masyarakat yang

Budaya yang berkembang di Desa Sumber Agung adalah Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus adalah Suku Jawa, Lampung dan suku sunda, karena kebanyakan masyarakat yang ada di Desa Sumber Agung pada zaman dahulu adalah penduduk pindahan dari pulau Jawa yang berhijrah ke Sumatra dan menjadi penduduk asli Desa Sumber Agung, selain itu suku Jawa Merupakan salah satu budaya yang berusia tua dan masih bertahan sampai saat ini, dan juga Bahasa Jawa sudah menjadi Bahasa keseharian.

Dalam pertumbuhannya kebudayaan Jawa mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai Islam juga mengisi dan memberi corak terhadap kebudayaan Jawa, karena kebudayaan Jawa dan Lampung di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, dilandasi dan banyak diangkat nilai-nilai islam menguasai dimensi budaya orang Jawa dan orang Lampung.

Hal ini dapat dilihat pada acara resepsi pernikahan yang menggunakan adat Jawa dan khitanan anak, dimana pada cara tersebut dilaksanakan secara adat dan Agama. Yang dikhitkan terlebih dahulu melaksanakan khataman Al-Qur'an dan pada acara tersebut dilaksanakan acara kenduri dan doa selamat.

Masyarakat Desa Sumber Agung di samping sebagai masyarakat adat mereka juga taat menjalankan perintah-perintah agama. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas dan kreatifitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, seperti melaksanakan sholat secara jamaah serta ada

kegiatan pengajian dan wirid yasinan yang dilakukan oleh Ibu-ibu, dan juga dilakukan oleh Bapak-Bapak dan dilakukan oleh para Remaja Masjid-Masjid (RISMA).

Asal mula pemberian nama Dusun Sumber Agung ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat yang kebanyakan berasal dari daerah di Jawa Barat. Dari musyawarah para tokoh tersebut disepakatilah nama Sumber Agung sebagai nama Dusun yang diusulkan oleh Bapak Irtha' yang pada saat itu menjabat sebagai kaum/modin, sebagai tanda bahwa didaerah ini dibuka dan dihuni oleh kebanyakan orang yang berasal dari Bandung Jawa Barat. Hal itu sebagai bentuk peringatan pada asal daerah orang-orang yang telah berjasa membuka dan membangun Dusun Sumber Agung pada masa awal pendiriannya.

Sedangkan silsilah Kepemimpinan Dusun Sumber Agung adalah sebagai berikut:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| a. Bapak Abdul Ghofur  | Th. 1920 - Th. 1930       |
| b. Bapak Slamet Efendi | Th. 1930 – Th. 1950       |
| c. Bapak Soekarno      | Th. 1950 – Th. 1960       |
| d. Bapak Warid         | Th. 1960 – Th. 1981       |
| e. Bapak Sami'un       | Th. 1900 – Th. 2007       |
| f. Bapak Suharjo       | Th. 2007 – Th. 2013       |
| g. Bapak Sarjuni       | Th. 2013 – Th. 2015       |
| h. Bapak Nasir         | Th. 2015- sampai sekarang |

## 2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Agung Kabupaten Tanggamus adalah 4.364 orang dengan 2.172 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	245	249	494
2	6-10 Tahun	194	195	389
3	11-25 Tahun	606	608	1214
4	26-35 Tahun	400	402	802
5	36-45 Tahun	266	275	541
6	45-55 Tahun	225	227	452
7	56-tahun keatas	233	239	472
	Jumlah	2.169	2.195	4.364

*Sumber Data: Statistik Kantor Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo*

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus adalah 4.364 jiwa, dengan jumlah laki-laki berjumlah 2.169 dan perempuan berjumlah 2.195 Jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa perempuan berjumlah lebih besar dari pada laki-laki, dan juga penduduk terbesar pada usia 11-25 tahun, yaitu 1.214 jiwa dan jumlah terkecil pada usia 6-10 tahun yaitu 389 jiwa.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Produktif**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	11-15 Tahun	606	608	1.214
2	26-35 Tahun	400	402	802
3	36-45 Tahun	266	275	541
4	Jumlah usia produktif	1.272	1.285	2.557
5	Jumlah anak-anak	439	444	883
6	Jumlah orang tua	458	466	924
	Total	2.165	2.195	4.364

*Sumber Data: Statistik Kantor Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo,*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dalam usia produktif katagori usia (11-25 Tahun) berjumlah 1.214 orang usia (26-35 Tahun) yaitu berjumlah 802 orang dan usia (36-45 tahun) berjumlah 541 orang. Sehingga jumlah penduduk usia produktif Desa Sumber Agung Berjumlah 2.557 orang.

### **3. Kondisi Geografis**

Desa Sumber Agung memiliki luas wilayah 596.600 Ha dengan lahan produktif 380.6 Ha meliputi :

**Tabel III**  
**Tata Guna Tanah**

No	Tata Guna Tanah	Luas	Ket.
1	Pemukiman	216.006 Ha	
2	Sawah irigasi tehnis	- Ha	
3	Sawah irigasi setengah tehnis	108.297 Ha	
4	Sawah tadah hujan	67.927 Ha	
5	Perkebunan	115.855 Ha	
6	Tegalan	90.570 Ha	
7	Pasar	1 Ha	
8	Kuburan	3.5Ha	
9	Jalan, sungai dll.	590 Ha	



*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo  
Kabupaten Tanggamus*

**Tabel IV**  
**Jumlah RW dan RT**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET.
1	Sumber agung Barat	1	2	
2	Sumber Agung Timur	1	2	
	J U M L A H	2	4	

*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo  
Kabupaten Tanggamus*

Letak Desa Sumber Agung berada di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan Sumberejo jarak dari Desa Sumber Agung ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 8 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 14 km.

#### **4. Kondisi Perekonomian**

Jumlah penduduk Desa Sumber Agung sebanyak 1668 jiwa dengan penduduk usia produktif 1618 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 50 Kepala Keluarga. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah berkebun/ petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah Hasil pertanian sawah dan kopi.

**Tabel V**  
**Jumlah Penduduk Tiap Dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sumber Agung I	2	208	470	380	850
2	Sumber Agung II	2	252	339	479	818

Jumlah	4	460	809	859	1668
--------	---	-----	-----	-----	------

*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten*

*Tanggamus*

**Tabel VI**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumber Agung**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	39 Orang
2	TNI dan POLRI	2 Orang
3	Petani	1139 Orang
4	Buruh	152 Orang
5	Pedagang	85 Orang
6	Pertukangan	50 Orang
7	Karyawan swasta	33 Orang
8	Mengurus Rumah Tangga	42 Orang
9	Belum bekerja	15 Orang
10	Tidak bekerja	32 Orang
11	Lain – lain	59 Orang

*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten*

*Tanggamus*

## 5. Kondisi Sosial Budaya

**Tabel VII**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	36 Orang
2	Tidak tamat SD	45 Orang
3	Tamat SD	85 Orang
4	Tamat SLTP	320 Orang
5	Tamat SLTA	1021 Orang
6	Tamat Akademi/D.1-D.3	46 Orang
7	Tamat S.1	104 Orang
8	Tamat S.2	10 Orang

9	Tamat S.3	2 Orang
---	-----------	---------

*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten*

*Tanggamus*

## 6. Kondisi Sarana dan Prasana

Desa Sumber Agung memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Sumber Agung mempunyai Kantor Desa dan Balai Desa/Gedung Serba Guna (GSG) di Dusun Sumber Agung I, disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi pemerintah dusun, sedangkan di Desa Sumber Agung mempunyai 4 RT (Rukun Tetangga).

Sarana prasarana tersebut dapat dipergunakan dengan tertib, aman dan lancar sesuai peraturan serta senantiasa memberikan pelayanan.

### b. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Sumber Agung mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar. Dengan rincian.

**Tabel VIII**  
**Sarana Prasarana Desa**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Annisa	Sumber Agung I	Baik
2	TK/ RA	TK Islam	Sumber Agung I	Baik
		RA Ma'arif	Sukamanah I	Baik
		TK Al Huda	Sukamanah VII	Baik
3	SD/MI	SDN 1	Sumber Agung I	Baik

		SDN 3	Sumber Agung II	Baik
		SDN 4	Sumber Agung II	Baik
		SDN 8	Sukamanah III	Baik
		MIN Model	Sumber Agung	Baik
4	SMP/MTs	MTs. MU	Sumber Agung II	Baik

*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*

**a. Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Sumber Agung mempunyai Puskesmas di tingkat Desa dengan 1 orang dokter desa dan posyandu di dusun 2, masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

**b. Sarana dan Prasarana Keagamaan**

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Sumber Agung mempunyai masjid dan mushola di dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel IX**  
**Sarana Prasarana Desa**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
I. 1	Masjid	Al- Mutaqien	Sumber Agung I	Baik
II. 1	Mushola	Miftahul Ulum	Sumber Agung II	Baik
2		Al Fattah	Sukamanah II	Baik

*Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*

**B. Praktik Kerja sama Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Hewan Ternak**

**Sapi Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo**

**Kabupaten Tanggamus**

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik kerjasama pengembangbiakan hewan ternak sapi di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani dan berkebun saja, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil ternak kambing dan sapi, dan dapat dilihat dari banyaknya jumlah hewan dalam usaha peternakan yang dilakukan oleh penduduk desa Sumber Agung, pada table berikut ini:

**Tabel X**  
**Jumlah Hewan Ternak Desa Sumber Agung**

No	Jenis populasi ternak	Jumlah
1	Sapi	7 ekor
2	Kambing	13 ekor
3	Kerbau	2 ekor
4	Ayam	200 ekor
5	Bebek	20 ekor



6	Babi	-
7	Kuda	-

*Sumber: Observasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*

Keadaan geografis desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, wilayah ini sangat menunjang untuk memelihara dan berternak dikarenakan iklim cuaca yang cocok dan juga banyak tersedianya pakan ternak, sehingga masyarakat setempat menyukai dalam menjalankan usaha tersebut. Dilihat dari banyaknya hewan sapi (pada table diatas), berdasarkan observasi penulis lakukan pada kepemilikan hewan sapi tersebut sebagian besar bukan milik sendiri, sebab sebagian besar penduduk setempat tidak cukup memiliki biaya atau modal untuk menjalankan usahanya sendiri yang melainkan sapi tersebut ialah kerjasama bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kelurahan Sumber Agung, dengan menyebarkan angket (Questioner), kepada masyarakat peternak di Desa Sumber Agung Penulis mendapatkan sebanyak 7 orang penduduk yang menjalani usaha peternak sapi. Adapun data kepemilikan hewan ternak yang penulis dapatkan, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel XI**  
**Kepemilikan Hewan**

No	Pilihan Jawaban	Sample	Frekwensi	Ket
1	Kepemilikan sendiri	3	3	42,9 %
2	Kerjasama bagi hasil	4	4	57,1 %

Rumus:  $\frac{\text{frekwensi}}{\text{Sample}} \times 100$

*Sumber: Observasi Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*

Dari table diatas berdasarkan kepemilikan hewan, terlihat bahwa masyarakat Sumber Agung lebih banyak melakukan kegiatan usaha kerjasama bagi hasil sapi sebanyak 4 orang atau dipersentasikan yakni 57,1 %, dari pada yang melakukan kegiatan usaha sendiri yakni 3 orang atau 42.9 %, kemudian dari 4 orang yang melakukan kerjasama bagi hasil sapi tersebut, penulis menjadikannya sample untuk mengetahui kegiatan bagi hasil gaduh kambing di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo.

Kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi yang dilakukan masyarakat Sumber Agung, merupakan salah satu bentuk usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bagi si pemilik modal hanya semata-mata untuk kegiatan bisnis guna meningkatkan tingkat perekonomian serta menjalin hubungan baik saling tolong menolong antar pemilik modal dengan pengelola usaha.

Dalam pelaksanaannya bagi hasil hewan ternak sapi tersebut antara pemilik modal dan pengelola usaha pada umumnya mengadakan perjanjian terlebih dahulu secara lisan, dikarenakan pemilik modal dan pengelola modal masih ada hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

Adapun isi perjanjian yang dilakukan antara si pemilik modal dan pengelola usaha kerjasama bagi hasil ternak sapi yang berada di Desa Sumber Agung lazim berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik modal dan pemelihara, atau dipatut hargan induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak dan

kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.

2. Jika ternak itu jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah:

- Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua.
- Jika induknya tidak dipatut harganya maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, karna sifatnya hanya social saja.

3. Jika ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memelihara kembali.

4. Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara, biasanya kedua belah pihak pasrah kepada takdir tersebut.

Kegiatan bagi hasil (mudharabah) ternak sapi merupakan akad kerja sama antar pemilik modal dengan pihak yang bias menjalankan kegiatan produktif, dalam menjalankan mudharabah pemilik modal mempercayai dan menyerahkan modal sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk mempergunakan modal tersebut, dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup. Untuk itu dalam menjalankan usaha

bagi hasil ternak sapi pada pelaksanaannya bagi sipemilik modal harus benar-benar mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan, sedangkan bagi si pemelihara harus mengetahui proses kerja yang baik, agar dapat berjalan sesuai dengan kinerja yang baik pula.

Langkah-langkah yang dibutuhkan bagi si pemilik modal dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi. Sebagai berikut data yang penulis dapatkan<sup>108</sup>:

1. Mulai dengan mencari lokasi yang baik untuk memelihara sapi. Daerah yang ideal adalah yang sepi daerah yang jauh dari keramaian, tapi yang mempunyai fasilitas jalur transport untuk mobil, dan tidak jauh dari daerah tempat tanaman pakan ternak. Di Desa Sumber Agung merupakan daerah yang sangat cocok untuk melakukan kegiatan ternak sapi.
2. Setelah menemukan daerah yang cocok, carilah penduduk setempat yang memiliki lahan untuk diajak kerjasama dengan menjadikan mereka sebagai peternak dengan perjanjian bagi hasil, sehingga bagi pemilik modal dapat mengirit modal lahan. Proses bagi hasil keuntungan biasanya dilakukan pada masa panen dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
3. Setelah perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mulailah mencari sapi yang cocok (bagus, sehat, berumur 15 bulan dengan harga sesuai). Untuk dipelihara setelah masa panen selama 7 bulan dari proses

---

<sup>108</sup>Wawancara Supandi: Pemilik Sapi. Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tanggal 12 Maret 2018

pemeliharaan yang kemudian membagi hasil keuntungan dari proses usaha ternak sapi tersebut.

4. Buatlah kandang kambing dengan ukuran 8x8 meter untuk kapasitas 2-3 ekor sapi. Kadang tersebut menghadap ketimur atau kebarat agar mendapat cahaya matahari yang cukup supaya tidak lembap.

Dari data diatas, bahwa pemilik modal menyediakan sepenuhnya modal tersebut kepada si pemelihara, sedangkan si pemelihara hanya bertanggung jawab atas proses kerjanya saja, berdasar hasil yang penulis lakukan berikut proses kerja bagi si pemelihara (pengelola usaha) dalam usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Sumber Agung<sup>109</sup>:

1. Mengontrol setiap hari hewan ternak agar didapatkan hasil yang maksimal dan menangani langsung bila terjadi masalah.
2. Si pemelihara bertanggung jawab atas sapi yang dipeliharanya. Sebelum si pemelihara berangkat mencari pakan, mereka harus membersihkan kotoran-kotoran sapi. Si pemelihara pergi mencari pakan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari.
3. Untuk memperoleh modal berupa vitamin ternak guna meningkatkan kualitas ternak, si pemelihara mengumpulkan kotoran-kotoran ternak kedalam karung, kemudian menjual kotoran tersebut kepada petani untuk dijadikan pupuk. Kemudian dari hasil penjualan tersebut si pemelihara

---

<sup>109</sup> Wawancara Bpk Somahodin: Pemelihara Sapi. Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tanggal 12 Maret 2018



membelikan konsentrat untuk sapi berupa gabah, limbah jagung, limbah pisang dan ampas tahu.

4. Mengikuti organisasi ternak setempat agar mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk usaha ternak, informasi banyuan dari pemerintah itu dapat berupa layanan kesehatan ternak secara gratis.
5. Menjaga agar kandang sapi tetap bersih dan kering agar tidak ada parasite-parasit yang dapat hidup di udara lembab dan basah.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembang Biakan Ternak Sapi Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterpakn terdiri dari dua bentuk yaitu: *Profit Sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang memperhitungkan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

##### 1. *Profit sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>110</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

---

<sup>110</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h.

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 2. *Revenue sharing*

*Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan,

mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang *notabene* diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut.

Di sinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian. Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.

Dari uraian di atas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total Cost* terhadap total *revenue*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung *mudharib*. Pembahasan dalam hal ini yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari kerja sama bagi hasil antara pemilik sapi dan pengelola. Adapun tujuan akad untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Harga modal awal atau modal pokok ditentukan oleh pedagang sapi dan pedagang sapi itu didatangkan atas persetujuan kedua belah pihak.



Akad kerja sama antara pemilik dan pengelola sapi dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk akad dalam bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis. Misalnya pemilik sapi berkata: saya memberikan sapi ini untuk dipelihara. Pemelihara menjawab: saya terima sapi anda untuk saya pelihara. Jadi antara pemilik dan pemelihara sapi hanya berdasarkan atas suka rela dan adanya rasa kecocokan diantara mereka. Isi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemilik sapi kemudian dikatakan kepada pihak pengelola, setuju atau tidak. Kalau setuju dengan perjanjian tersebut maka pihak pengelola dimohon untuk mengatakan qabul (penerimaan) yang berarti bahwa kerjasama tersebut berjalan.

Harga pokok sapi adalah harga sapi dengan adanya perjanjian atau kesepakatan untuk memelihara. Harga pokok ditentukan oleh pemilik sapi dan pemilik sapi memperoleh pandangan tentang harga dari pedagang sapi. Dan pemilik sapi dengan pemelihara sapi membuat kesepakatan sesudah kedua belah pihak mengetahui harga pokok dari pedagang sapi itu. Maka terjadilah akad (perjanjian) dalam bagi hasil itu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di desa Sumber Agung, dari usaha bagi hasil ternak sapi yang mereka lakukan antara pemilik sapi dan si pemelihara (pengelola usaha), mereka bersama-sama dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan usahanya dan membagi keuntungan dari hasil panen setiap satu tahun sekali dalam setahun.

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapat bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian pada prakteknya lembaga keuangan profit sharing sangat jarang digunakan apabila system ini diterapkan maka pihak shahibul maal menggunakan biaya oprasional. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh shahubul maal, karena pengelola atau mudharib dapat meninggikan biaya oprasional sehingga akan berpengaruh pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya oprasional tinggi maka bagi hasil bersih dibagikan akan menjadi sedikit.

Berbeda dengan revenue sharing kedua belah pihak akan mendapat bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelolaan memperoleh revenue maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil dari pada biaya oprasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya tidak meninggikan biaya oprasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir biaya tersebut agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya oprasional, jika demikian maka usaha tersebut mengalami keuntungan.

Hubungan Antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya. Dari penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani dan berkebun saja, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil ternak sapi yang sudah lama dijalani oleh penduduk desa Sumber Agung.

Usaha bagi hasil peternak sapi di Desa sumber Agung, para anggota tidak memberi nama dengan system *mudharabah*. Mereka hanya menyebutnya dengan system bagi hasil. Secara teoritis system bagi hasil ini terbagi ini terbagi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* atau *syirkah*. Penulis menuliskan bahwa system bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahubul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan system bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjelaskan suatu usaha atau proyek

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal dan pemelihara sapi.

Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi.

Berdasarkan hasil interview dengan pemilik peternakan sapi dan pengelola, diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil ternak sapi, yaitu:

Bapak Ingun, dan bapak Supandi selaku pemilik sapi menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan disebabkan karena tidak dapat mengelola hartanya sendiri dan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya.<sup>111</sup> Seorang pengelola harus memiliki keahlian dalam mengelola ternak sapi. Akad dilakukan secara lisan, tidak ada batas waktu yang ditentukan saat akad dilakukan. Modal sepenuhnya dari pemilik sapi. Kerjasama bagi hasil ini hanya didasarkan unsur tolong menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama masyarakat pemilik sapi dan pemelihara sapi mampu menguntungkan kedua belah pihak.

Begitu pula dengan Bapak Turiman dan Bapak wagiman selaku peternak sapi yang dimana keuntungan yang diperoleh dalam bagi hasil ternak sapi sebenarnya yang membantu perekonomian, namun lama dalam memperoleh hasilnya karena menunggu perkembanbiakan ternak sapi terebut.<sup>112</sup> Dengan demikian usaha ternak sapi ini sangat saling membantu satu sama lain.

---

<sup>111</sup> Wawancara Bpk Ingun dan supandi: Pemilik Sapi. Pekon Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tanggal 12 Maret 2018

<sup>112</sup> Wawancara Bapak Turimin dan Wagiman: Petrnak Sapi. Pekon Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tanggal 12 Maret 2018

Latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan yaitu pengelola membutuhkan modal dan pemilik sapi membutuhkan tenaga dan kemampuan pemelihara untuk memelihara sapi. Untuk memenuhi harapan tersebut maka kerjasama merupakan alternatif yang baik dalam kegiatan kerjasama ternak sapi.

Akad atau perjanjian *mudharabah* yang dilakukan di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik dan pemelihara sapi dan disaksikan pedagang sapi.

Akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab dan qabul. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab dan qabul.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam kumpulan data, baik berupa angket, wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Sumber Agung dalam menjalankan ternak sapi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, seperti :

- a. Akad yang terjalin antara *shoibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika jadi komplek pengelola tidak ada bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.
- b. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kontrak. Kontrak usaha tersebut pemilik modal dengan pengelola



sama-sama melakukan kesepakatan awal, kejelasan mengenai usaha ternak sapi dan bagi hasilnya, bahwa pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk dipelihara sapi tersebut, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan system bagi dua atau 50:50, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Hanya saja pemilik sapi ini tidak membagi keuntungan kepada pengelola sapi sesuai dengan kesepakatan, jika ada pemilik mengambil uang tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola dan jika ada perubahan akad maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga hal ini melanggar prinsip Islam yaitu menzalimi orang lain.

Karena pada prinsipnya akad mudharabah dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (amanah), bagi shabibul maal sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada seseorang lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>113</sup>

Pada umumnya system bagi hasil di Desa Sumber Agung dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat

---

<sup>113</sup> *Ibid.*,

bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan system bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berfingsip tolong menolong dalam bebrbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil Antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

#### **B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembang Biakan Ternak Sapi Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus**

Kegiatan usaha pengembangbiakan tarnak terutama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu' (akad) dan al-ahdu' (janji).<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45

Kegiatan Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang bias setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar..(Q.S Al- Baqarah, ayat:282)*

Firman di atas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan

dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
4. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa system bagi hasil ternak sapi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis

lakukan pada Desa Sumber Agung modal yang diberikan berupa Sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syari'ah Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (ta'awanu) dan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi.

Melihat dari uraian diatas menurut penulis pelaksanaan kerjasama ternak sapi didesa Sumber Agung sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tinjauan Hukum Islam tentang kerjasama Bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah salah satu yang sesuai pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawaban apabila hewan sapi mati akibat kelalaian pihak pemelihar dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan

konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan beberapa uraian disamping, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melakukan akad mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sebaiknya ada perjanjian tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syari'at Islam. Dan kepada aparat desa Sumber Agung supaya para peternak sapi mendapatkan informasi atau penyuluhan kesehatan dan perawatan hewan ternak yang baik. Sejalan dengan program dari pemerintah tersebut masyarakat peternak di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan tingkat kualitas dari hewan pemeliharanya dapat lebih baik lagi.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus hendaknya dapat meningkatkan dakwah dan peransertanya terutama mengenai masalah muamalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha kerjasama bagi hasil melalui budi daya pengembangan ternak sapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Al-Mushlih, Abdullah. Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daruq Haq, 2008.
- Al-Syarbini, Muhammad, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah
- Antonio, Muhammad, Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash Siddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Capra, M. Umer, *Towards A Just Monetary System (terjemahan)*, London: The Islamic Foudation, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007.
- Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakata:Gema Insani, 2006.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Juz II, Mesir: Tiariyah Qubra

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan/Online, KBBI Pusat Bahasa  
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Kadir, Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Kadir, Muhammad, Abdul. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: PT Citra Aditia Baki, 2010

Khalaf, Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Majah, Abdullah bin Yazid Ibnu Abu, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah.

Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.

Mujiep, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Musleihudin, Muhammad, *Sistem Perbankan Salam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Muslich, Achmad, Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, cet.8, 2007.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, Bandung: AL Ma'arif, 1997

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003

Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif

*Wawancara* Bpk Ingun dan supandi: Pemilik Sapi. Pekon Sumber Agung  
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tanggal 12 Maret 2018

*Wawancara* Bpk Turimin dan wagiman : Pengelola Sapi . Pekon Sumber Agung  
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tanggal 12 Maret 2018





## **PANDUAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK DAN PETERNAK BAGI HASIL TERNAK SAPI**

### **A. Pemilik Modal/Sapi**

1. Sejak kapan bapak memulai usaha kerjasama bagi hasil ternak sapi ?
2. Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses kerjasama bagi hasil sapi?
3. Bagaimana system permodalan dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi ?
4. Bagaiman cara membagi hasil keuntungan dari kerjasama bagi hasil ternak sapi ?
5. Berapa lama hewan sapi dititipkan dalam proses kerjasama bagi hasil ?
6. Bagaimana system operasional pemeliharaan kerjasama bagi hasil ternak sapi ?
7. Bagaimana akad apabila terjadi kematian pada hewan sapi tersebut?

### **B. Pengelola/ Pemelihara Sapi**

1. Sejak kapan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi?
2. Apa pekerjaan bapak selain sebagai pemelihara sapi?
3. Berapa sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi?
4. Apa saja kendala yang bapak alami selama proses kerjasama bagi hasil sapi?
5. Fasilitas apa saja yang bapak dapat dari pemodal?

6. Bagaimana akad perjanjian mengenai bagi hasil ternak sapi?
7. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam satu periode panen?
8. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah bapak dapat dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi ini?
9. Apakah perhitungan bagi hasil melalui musyawarah bersama pemodal?

